

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ashshofa, Burhan 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2010, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Djojosoekarto, Agung, Rudiarto Sumarwono, dan Cucu Suryaman, 2008, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Hadi, Yonathan Setianto, dkk, 2014, *Postur APBN Indonesia*, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Hariadi, Pramono, Yanuar E. Restianto, dan Icuk Rangga Bawono, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki, Paramita Prananingtyas, dan Fahimah, 2010, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Haryono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

- Hernawan, Ari , 2013, *Ketidakadilan dalam Norma dan Praktek Mogok Kerja di Indonesia*, Udayana University Press, Denpasar.
- Huda, Ni'matul, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Nusamedia, Bandung.
- Huda, Ni'matul 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- Huda, Ni'matul & R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- M, Sri Soemantri, 1982, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- MD, Moh. Mahfud, 2007, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Empat Tulisan tentang Hukum*, Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjajaran, Bandung.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mardikaningsih, Rini dan R. Sumaryanto, 2013, *Sejarah untuk Kelas XII SMA dan MA Program IPS*, Solo, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Raharusun, Yohanis Anton, 2009, *Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ranuwijaya, Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Solossa, Jacobus Perviddy, 2005, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Sinar Harapan, Jakarta.

Subagio, M, 1988, *Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutedi, Adrian 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal, Laporan Penelitian, Skripsi, dan Usulan Penelitian :

Cornelis Lay, Pratikno, AAGN Ari Dwipayana, dkk (Tim Redaksi), “Keistimewaan Yogyakarta Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta”, *Monograph on Politics & Government*, Vol. 2. No 1. 2008, 2008.

Joachim Wehner, “Assymetrical Devolution”, *Development Southern Africa*, vol. 17, 2000.

Pradhani, Sartika Intaning, 2015, “Pengaturan dan Pengelolaan Keuangan Urusan Kebudayaan sebagai Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Usulan Penelitian Tesis*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pradhani, Sartika Intaning dan Sukiratnasari, 2014, “Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua”, *Laporan Penelitian*, Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Utomo, Tri Widodo Wahyu, 1999, “Tinjauan Historis Yuridis Tentang Hukum Pertanahan di Yogyakarta sebagai Konsekuensi Penetapan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa” dalam buku berjudul “Hukum Pertanahan dalam Perspektif Otonomi Daerah”, *Skripsi*, Penerbit Navila, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 972).

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 37).

Internet

Bimbingan, “Definisi Belanja Langsung APBD”, *Australia.com*, www.bimbingan.org, diakses pada tanggal 30 Maret 2016.

Direktorat Jenderal Anggaran, “Money Follow Function dalam Penganggaran Berbasis Kinerja”, *website Direktorat Jenderal Anggaran*, www.anggaran.depkeu.go.id, diakses pada tanggal 30 Maret 2016.

FNH, “Asumsi Makro Melenceng, APBN harus diubah”, *website hukum online*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 16 Maret 2016.

Rosihan Anwar, “DIY Ranging Empat Penerimaan Pajak Nasional”, *RRI on*, rri.co.id, diakses pada tanggal 30 April 2014.